

Februari 2000, Th. XIX, No. 1

cakrawala pendidikan

MAJALAH ILMIAH KEPENDIDIKAN

**PENERBIT LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

ISSN : 0216 - 1370

CAKRAWALA PENDIDIKAN

Majalah Ilmiah Kependidikan

Visi : Menumbuhkan Cakrawala Berfikir Partisipatif dalam Pembangunan Nasional melalui IPTEKS.

Misi : Pemberdayaan dan Penajaman Orientasi Masyarakat Pendidikan Indonesia dalam Pembangunan Nasional

Penerbit

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Ketua Penyunting

Prof. Dr. H. Wuryadi, MS.

Anggota Penyunting

Prof. Dr. H. Sodik A. Kuntoro, M Ed.

Dr Sumarno, MA.

Prof. Dr. Hj. Aliyah Rosyid, M Pd

Prof. Dr. Hj Darmiyati Zuchdi, M.Sc.

Dr Hj. Nurfina Aznam, Apt , SU.

Dr. Sarbini Hs.

Drs. Sukidjo, M.Pd

Drs. H. Sukoco, M Pd

Drs Bambang Subali, MS

DR. Soeharto, MSOE

Drs Wawan Sundawan, M Ed

Drs. Kastam Syamsi, M.Ed

Drs. Bambang Priyanto

Penyunting Ahli

Prof. Dr. H. Masrun, MA. (UGM Yogyakarta)

Prof. Dr. Sabarti Akhadiah (UNIV NEGERI JAKARTA)

Prof. Dr. H. Djohar, MS. (UNIV NEGERI Yogyakarta)

Prof. Dr. H. Noeng Muhadjir (UAD Yogyakarta)

Prof. Dr. A. Syafii Maarif, MA. (UNIV NEGERI Yogyakarta)

Dr. Suryanto (UNIV NEGERI Yogyakarta)

Sekretariat

Drs. Supantoro

Siti Mariana, S.Sos.

Sri Wiyati, B.Sc.

Heni Susilowati

Widiyanto

SK MENTERI PENERANGAN RI :

STT Nomor 820/SK DITJEN PPG/STT/1981 Tanggal 9 Maret 1981

ISSN : 0216 - 1370

Alamat Redaksi

LPM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281

Telpon 0274 - 586168 Psw 233, 346, 359 dan 273

Fax. 0274-565500

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	i
Daftar Isi	ii
1. Pengaruh Eksternal dan Pergeseran Konsep Kurikulum Oleh : Suharto	1 - 6
2. Nilai Pendidikan Keluarga pada Masyarakat Pedesaan Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta Oleh: Supriyoko	7 - 12
3. Pengelolaan Kelas Terpadu: Suatu Bentuk Pengelolaan Kelas Alternatif Oleh: Anik Ghufron	13 - 18
4. Gaya Hidup Penduduk Pinggir Kali Code dan Upaya Pembinaannya Oleh: Gunardo R. B.	19 - 24
5. Mengintegrasikan Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesehatan: Wellness Education Oleh: Wawan S. Suherman	25 - 29
6. Beberapa Aspek Pendidikan Bahasa dalam Konteks Bilingual Indonesia Oleh: Susilo Supardo	30 - 35
7. Identifikasi Diri sebagai Wisnu dan Peranannya bagi Pembinaan Sikap Heroisme dan Nasionalisme Sultan-Sultan Yogyakarta Oleh: A. Daliman	36 - 41

PENGARUH EKSTERNAL DAN PERGESERAN KONSEP KURIKULUM

Oleh: Soeharto

Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji pertalian antara kemauan politik pemerintah, kondisi masyarakat, dan perkembangan ilmu manajemen dengan produk kurikulum, di samping mengidentifikasi adanya pergeseran konsep/filosofi memacu para pemerhati kurikulum untuk menelusuri lebih mendalam. Fokus pengkajian dilakukan pada kurikulum sekolah dasar 1968, 1975, 1986, dan kurikulum pendidikan dasar 1993. Data yang diperoleh digolongkan agar lebih mudah untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Wawancara diselenggarakan dengan dua orang guru SD yang mengalami pemberlakuan keempat kurikulum tersebut. Simpulan menunjukkan bahwa kurikulum dipengaruhi oleh kemauan politik pemerintah, kondisi masyarakat, dan perkembangan ilmu manajemen. Di samping itu walaupun terkesan prematur ada indikasi kecenderungan pergeseran konsep kurikulum menjadi lebih esensial. Implikasi dari kesimpulan di atas dialamatkan kepada pengembang kurikulum agar mempertimbangkan isu-isu yang sedang berkembang saat ini (seperti demokrasi, kebebasan mengemukakan pendapat, pembudayaan toleransi, taat pada hukum, dan semangat reformasi menuju masyarakat madani) untuk dijadikan dasar penyusunan kurikulum mendatang. Di samping itu, pengkajian dampak perubahan kurikulum menjadi penting, seandainya tanda-tanda pergeseran ke arah esensialis menjadi menguat.

Kata kunci: pengaruh eksternal, pergeseran filosofi kurikulum

EXTERNAL INFLUENCE AND SHIFT OF CURRICULUM CONCEPT

Abstract

The main purpose of this study is to investigate the influence of the government's political intention, of society's condition, and of the development of the science of management on the curriculum, besides to identify the existence of a conceptual or philosophical shift in the newest curriculum. It is hoped that this study will trigger curriculum reviewers to conduct deeper and more detailed observation. This study is focussed on the Primary School's Curricula of 1968, 1975, and 1986, and the Elementary Education's Curriculum of 1993. The data obtained are categorized

for convenience in answering the proposed questions. Interviews were conducted on two primary school teachers who experienced the implementation of the four curricula. The results indicate that the curriculum is influenced by the government's political intention, society's condition, and the development of the science of management; in addition, though the impression is that of a premature conclusion, there are indications of the tendency of a shift in the concept of the curriculum toward a concept concerned more with the essentials. The implication is that curriculum developers are urged to consider the most recent issues (such as, democracy, freedom of expression, development of tolerance, law obedience, and the spirit of reformation toward a civil society) in determining the fundamentals of future curricula. In addition, the study of the effects of a change in the curriculum becomes important if indications of such a shift as mentioned above becomes stronger.

Key Words: external influence, shift of curriculum concept

Pendahuluan

Pengkajian kurikulum ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengetahui apakah benar bahwa kurikulum di suatu saat mencerminkan suasana dan tuntutan masyarakat serta kemauan politik pemerintah pada saat pemberlakuan kurikulum tersebut. Fakta di negara maju menunjukkan bahwa kurikulum sedemikian rentan terhadap kenyataan yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat pengguna kurikulum tersebut. Salah satu contoh, hadirnya pendidikan seks ternyata mengiringi peningkatan angka kehamilan di luar nikah dan bunuh diri remaja. Demikian juga pengajaran berlalu lintas di sekolah, hadir setelah korban kecelakaan di jalan raya meningkat tajam. Apakah keberadaan faktor eksternal sedemikian berpengaruh pada kurikulum kita? Di samping itu dengan mencermati serangkaian kurikulum yang berlaku selama tiga puluh tahun terakhir ini (era menjelang tahun tujuh puluhan sampai kini) diharapkan dapat diketahui apakah terjadi kecenderungan pergeseran prinsip/filosofi kurikulum. Fakta menunjukkan bahwa pergeseran prinsip kurikulum pernah terjadi menjelang tahun 1850 di Boston, dari kurikulum yang semula didominasi prinsip

essensialisme ke progresivisme. Apakah di negara kita berlaku hal yang demikian?

Tujuan dicanangkan dalam kajian ini adalah untuk mengetahui apakah kemauan politik, kondisi masyarakat, dan perkembangan ilmu manajemen mempengaruhi kurikulum; dan selama ini adakah terjadi perubahan dominasi konsep/filosofi? Dengan melakukan kajian ini diharapkan dapat memicu para pemerhati masalah kurikulum untuk menelusuri lebih jauh dengan format kajian yang lebih tajam dan mendalam.

Konsep Kurikulum

Aliran filsafat kurikulum jumlahnya hampir tak terhitung, dan menjadi dasar yang dianut oleh pengembang kurikulum. Namun demikian secara garis besar dapat dipisahkan menjadi konsep kurikulum perenialis, idealis, pragmatis, rekonstruktif, eksistensialis, dan realis. Sementara itu Orstein (1995: 13-14), Wiles dan Bondi (1993) dan demikian juga Oliva (1988: 195-210), membagi ke dalam jumlah yang lebih sedikit, yakni kurikulum perenialis, esensialis, progresivis, dan rekonstruksionis.

Baik Ornstein, Wiles dan Bondi maupun Oliva, memiliki kesamaan baik dari segi filosofi, tujuan instruksional, peran guru/dosen, fokus maupun kecenderungan kurikulum. Konsep perenialis cenderung menyiapkan anak didik menjadi manusia yang rasional dengan intelektualitas tinggi, pengajaran berfokus pada *mastery of act*; dan peran guru lebih bersifat membantu siswa agar berpikir rasional dengan jalan diskusi serta dialoh. Bidang studi klasik dan sains dianggap sumber kebenaran, yang terwujud melalui pendekatan Socratesian yang kental dengan perdebatan mencari kebenaran.

Konsep esensialis menekankan untuk memperhatikan pertumbuhan anak didik dan melatihnya menjadi individu yang berkompeten; mengajarkan hal-hal yang pokok dan berorientasi akademik. Peran guru memiliki otoritas di bidang yang diajarkan. Fokus pengajaran pada skill dan materi ajar akademis yang esensial semata. Peran guru adalah sebagai panutan atau memberikan teladan bagi anak didiknya. Proses belajar lebih mengandalkan pada penguasaan konsep dan prinsip yang terkandung pada materi ajar.

Konsep progressivis mempromosikan kehidupan sosial yang demokratis, dan menciptakan suasana agar siswa tertarik pada materi ajar. Konsep progressivis menganggap bahwa segala sesuatu berada dalam proses pembaharuan. Kebenaran dalam ilmu penge-

tahuan tidak abadi, dan fungsi pembelajaran adalah membekali anak didik agar berpikir dengan benar daripada sekadar membekali pengetahuan.

Konsep rekonstruksivis menyadari bahwa pendidikan diarahkan untuk melakukan rekonstruksi masyarakat atau sosial. Konsep rekonstruktivis mengajarkan bagaimana mengupas problem yang berkembang dan mengacu pada perubahan masyarakat. Guru berusaha membantu anak didik untuk menentukan dirinya sendiri termasuk apa yang dipelajarinya. Peran guru sebagai agen perubahan dan reformasi, dan cenderung mengajak anak didik menjadi peneliti.

Pengkajian dan Faktor Penentu dalam Kurikulum

Pengkajian kurikulum dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tuntutan perubahan dan implementasinya. Klein berpendapat bahwa perubahan kurikulum dapat bersumber dari proses kognisi, aktualisasi diri, rekonstruksi sosial, dan rasional akademis (Ornstein, 1995). Proses kognisi dan rasional akademis mengubah kurikulum dengan pertimbangan bahwa kurikulum hendaknya bertumpu pada *the store house of knowledge*. Sementara itu menurut rekonstruksi sosial dan aktualisasi diri lebih menekankan bahwa perubahan kurikulum tergantung apakah masyarakat menghendaki adanya perubahan. Proses pemutakhiran kurikulum terjadi karena tekanan pentingnya perubahan. Menurut Tyler (dalam Oliva 1988: 170-172) pengkajian kurikulum dapat ditelusuri dari sumber-sumber sebelum penentuan tujuan umum institusi. Sumber tersebut adalah siswa, masyarakat, dan *subject matter*. Bilamana unsur tersebut menghendaki perubahan, maka perubahan tidak dapat dihindari.

Houston (1988, 324-325) menuliskan adanya faktor penentu kurikulum yang berasal dari faktor eksternal, baik dari tanggapan dari kondisi masyarakat, dan kelompok tertentu yang memiliki akses untuk mempengaruhi dunia pendidikan. Pertama, kejadian tertentu yang merebak di masyarakat dapat mempercepat kehadiran suatu mata kuliah. Sebagaimana contoh yang dipaparkan di awal tulisan ini, ketika angka kehamilan pada remaja meledak maka timbul keinginan untuk memasukkan pendidikan seks ke dalam kurikulum. Kehadiran mata kuliah vokasional dalam kurikulum ternyata didahului oleh angka pengangguran meningkat. Kedua, tekanan dari kelompok-kelompok yang memiliki special interest. Kelompok veteran dan militer selalu mengajukan usulan bahwa patriotisme, nasionalisme,

hendaknya masuk kurikulum; sama halnya dengan kelompok etnis tertentu mendorong masuknya perayaan hari besar kesukuan. Kelompok usahawan memberikan andil besar atas masuknya pelajaran *business* di sekolah menengah di Texas

Di sisi lain menunjukkan bahwa permintaan penekanan materi ajar dapat bersumber dari masyarakat. Rendahnya prestasi belajar matematika dibandingkan dengan prestasi belajar anak-anak dari negara lain, melahirkan tuntutan kualitas pada mata pelajaran matematika. Bahkan penerbit buku teks ikut menentukan kehadiran mata kuliah atau setidaknya topik materi ajar, melalui ketersediaan isi buku yang akan dijual baik ke guru maupun siswa

Kajian Kurikulum Sekolah Dasar di Indonesia

Fokus kajian dibatasi pada 4 (empat) kurikulum, yakni kurikulum Sekolah Dasar 1968, 1975, 1986 (selanjutnya disebut kurikulum 68, 75, dan 86), dan kurikulum Pendidikan Dasar 1993 (selanjutnya disebut kurikulum 93). Pemilihan ini berangkat dari asumsi bahwa kurikulum Sekolah Dasar memiliki dampak luas karena melibatkan banyak pelaku pendidikan. Pengkajian terhadap buku kurikulum bersifat kontekstual yang dipengaruhi oleh kemauan politik rezim penguasa, kondisi masyarakat, maupun ilmu manajemen yang sedang berkembang saat itu. Berikut ini adalah hal-hal yang mendukung temuan tersebut.

Dalam kurikulum 68 dinyatakan bahwa pembentukan manusia Pancasila sejati merupakan kemauan politik saat itu yang diamanatkan pada TAP MPRS No. XXVII/1966, Bab II, Pasal 3. Konteks saat itu pemerintah sedang berniat meniadakan paham komunisme mengiringi pemberontakan G 30 S/PKI. Demikian halnya kurikulum 75 tercantum tekad pendidikan seumur hidup sebagaimana telah diamanatkan dalam GBHN saat itu (1975: 10). Pemerintah saat itu gencar menjadikan pendidikan seumur hidup sebagai tema sentral pendidikan.

Pada saat pembakuan kurikulum 68, fakta menunjukkan bahwa masih banyak siswa sekolah dasar belum mampu berbahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sejak kelas I. Dampak dari keberagaman penguasaan siswa dalam berbahasa Indonesia, telah melahirkan 2 bentuk kurikulum 68, yakni kurikulum yang menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sejak kelas I, dan kurikulum yang menggunakan Bahasa Indonesia sejak kelas III. Suasana ini amat berbeda dengan tahun 90-an, bahasa Indonesia sudah dijadikan bahasa pengantar di Taman Kanak-kanak bahkan *Play Group*

Demikian juga halnya, pergeseran penekanan pembangunan dari yang semula bertumpu pada bidang pertanian ke bidang industri dan informasi, kuat dugaan melatarbelakangi hilangnya paket kejuruan agraris sesudah kurikulum 75

Dari sisi ilmu manajemen, tampak pertalian antara teori manajemen dan konsep kurikulum. Dalam buku manajemen yang ditulis oleh Gordon (1987) disebutkan bahwa tiap dekade diwarnai dengan pembaharuan pemikiran manajemen. Tahun 1960-an ditandai dengan berkembangnya teori analisis teknologi dan lingkungan, kemudian tahun 1970 ditengarai oleh hadirnya teori sistem, dan tahun 1980 ditandai dengan teori kontingensi (Gordon, 1987: 15). Dikaitkan dengan kurikulum 68, manifestasi analisis teknologi dan lingkungan tampak dengan adanya kelompok mata pelajaran ramah lingkungan. Siswa sekolah dasar mendapatkan mata pelajaran Kecakapan Khusus yang terdiri dari Kejuruan Agraria, Kejuruan Teknik yang isinya mengacu pada kebutuhan lingkungan.

Demikian halnya pada periode tahun 70-an, perkembangan manajemen ditandai dengan teori sistem yang melihat bahwa organisasi pendidikan dan pembelajaran sebagai suatu sistem yang memiliki input, transformasi, umpan balik, output, dan keseimbangan. Kehadiran kurikulum 75 dengan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI), adalah perwujudan teori tersebut yang dimulai dari subsistem penetapan instruksional, pengembangan alat evaluasi, penentuan kegiatan belajar-mengajar, sampai subsistem pelaksanaan kegiatan, dipandang sebagai suatu sistem lengkap dengan jalur umpan balik.

Pada dekade 80-an, teori manajemen yang berkembang adalah kontingensi yang memandang bahwa bentuk organisasi akan efisien bila selaras dengan karakteristik situasi dan kondisi. Karena kajian situasional ke arah yang lebih pragmatis, maka pengurangan dan penambahan terhadap kajian kebijakan yang berlaku menjadi dimungkinkan. Dalam kurikulum 86 terjadi rasionalisasi isi materi ajar dari kurikulum sebelumnya yang dipandang tidak perlu, sejalan dengan tuntutan yang berkembang pada masyarakat.

Perbandingan Kurikulum 93 dan Sebelumnya

Membandingkan kurikulum sebelum dan sesudah 93, terdapat tengara dini adanya pergeseran prinsip kurikulum ke arah dominasi yang lebih esensialis. Temuan ini disadari masih prematur sehingga memerlukan klarifikasi lebih jauh, walaupun demikian tanda pergeseran ke arah lebih esensialis sudah tampak. Seandainya indikasi ini semakin menguat dalam

implementasinya, maka kurikulum 93 dapat dijadikan titik awal pergeseran.

Kurikulum 68 dikembangkan berdasarkan 3 prinsip, yaitu: integralitas, kontinuitas, dan sinkronisasi. Pengembangan kurikulum dari SD sampai Perguruan Tinggi merupakan bagian integral, berkesinambungan dan memiliki kesatuan arah, irama, dan gerak menuju Pendidikan Nasional. Sementara itu, kurikulum 75 dikembangkan atas dasar 5 prinsip yaitu fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas, berorientasi pada tujuan, kontinuitas, dan pendidikan seumur hidup. Intinya melanjutkan kebijakan kurikulum sebelumnya disesuaikan dengan kemampuan dan faktor ekosistem (fleksibilitas), berorientasi pada tujuan (*goal oriented*), dan optimalisasi pendayagunaan personal yang terlibat (efisiensi dan efektivitas). Di sisi lain pada kurikulum 93 prinsip pengembangan terfokus pada kemampuan dan keterampilan dasar "baca tulis-hitung", yang lebih diarahkan ke keterampilan berbahasa serta berhitung yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (1993: 2). Tak satu pun pernyataan yang berkaitan dengan pertumbuhan anak didik tampak dalam pengantar kurikulum 93.

Dikotomi dengan memisahkan kurikulum 93 dengan kurikulum sebelumnya memberikan kesan bahwa kurikulum terdahulu lebih dominan perennialis dengan lebih menekankan pada pembentukan individu yang rasional dan intelektual. Sementara itu kurikulum 93 lebih essentialis karena fokus kurikulum adalah pada "baca-tulis-hitung" yang merupakan *skill* yang esensial. Arahnya memudahkan siswa mengembangkan berbagai kemampuan secara bertahap, seperti berpikir teratur dan kritis, memecahkan masalah sederhana, serta sanggup dan bersikap mandiri dalam kebersamaan (1993: 2).

Sekali lagi, tengara pergeseran ini mungkin masih terlalu lemah untuk disimpulkan, walaupun demikian pertanda ke arah itu sudah ada. Indikasi ini dapat menguat ataupun melemah, tergantung rumusan kurikulum-kurikulum mendatang.

Implikasi

Dari temuan-temuan di atas membawa implikasi yang luas dan menarik untuk dicermati lebih lanjut.

Implikasi pertama menyebutkan bahwa kurikulum bersifat kontekstual karena dipengaruhi oleh kemauan politik rezim yang berlaku, kondisi sosial budaya, maupun ilmu manajemen yang sedang berkembang pada saat itu. Oleh karena itu ke depan perlu dipertimbangkan beberapa isu penting sebagai prinsip

pengembangan kurikulum, seperti isu demokratisasi pendidikan dan pendidikan demokrasi, relevansi dengan dunia kerja, *multicultural education*, menghormati HAM, dan reformasi menuju masyarakat madani.

Untuk lingkup nasional, Nurhadi (1992: 1-2) menulis bahwa pendidikan nasional memasuki abad ke-21 menghadapi tiga tantangan besar: globalisasi, krisis ekonomi, dan reformasi pembangunan yang diarahkan ke arah terbentuknya masyarakat madani. Masyarakat madani yang dimaksud adalah masyarakat yang lebih demokratis dengan memberikan kesempatan partisipasi masyarakat yang lebih luas, dilandasi dengan kepastian hukum yang kuat, egalitarian dengan kepentingan keadilan masyarakat sebagai pandu penegaknya, menghargai harkat kemanusiaan, menghormati kemajemukan budaya dalam kesatuan bangsa, dan akhirnya yang etis religius dengan dilandasi kepada pengakuan dan pengamalan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk lingkup yang lebih luas, maka tantangan yang bersumber dari perubahan masyarakat telah dirumuskan oleh Stratton dikutip oleh De Rochee (1998: 2), meliputi menjamurnya *disfunctional families*, tingginya tingkat ketergantungan pada teknologi, ketercampakan anak-anak karena kejahatan, kemiskinan, dan kemudian tak terurus, bentuk wajah komunikasi yang lebih ragam, pengaruh media massa dalam usia anak yang lebih awal, kehidupan masyarakat yang serba tergesa-gesa, dan perubahan lingkungan kerja yang mengharuskan tingkat literasi yang lebih tinggi.

Dalam rangka menghadapi tantangan pembentukan masyarakat madani diperlukan strategi kebijakan pendidikan yang menekankan pada demokratisasi pendidikan, relevansi pendidikan, akuntabilitas eksternal pendidikan, yang berorientasi pada *student-center* dan *community-school based management*, pengembangan profesionalisme pendidikan, peningkatan efisiensi pendidikan, akomodasi kemajemukan bangsa, desentralisasi pendidikan, dan debirokratisasi pendidikan (Nurhadi, 1999: 6-7). Hal ini sejalan dengan hasil diskusi Phi Delta Kappa, sebagaimana ditulis oleh De Rochee, bahwa pendidikan saat ini dan saat mendatang hendaknya bertumpu pada demokrasi, kebahagiaan, tanggung jawab, kebebasan berpendapat, toleransi, kebebasan dalam beragama, taat hukum, dan tidak saling mengganggu (De Rochee, 1998: 19).

Berdasarkan pandangan Nurhadi dan De Rochee tersebut di atas, maka diusulkan kepada perumus kurikulum agar:

- (a) Kurikulum mendatang hendaknya mampu mendorong terciptanya masyarakat Indonesia baru yaitu

masyarakat madani, atau masyarakat yang lebih demokratis

- (b) Kurikulum mendatang hendaknya mampu menjembatani pendekatan pendidikan yang relevan dengan dunia kerja di satu sisi, tanpa melupakan pendekatan pendidikan yang menitikberatkan pada pengembangan diri anak didik, baik dari segi sikap, pengetahuan, maupun keterampilan.
- (c) Kurikulum mendatang hendaknya mengakomodasikan kemajemukan budaya atau *multi cultural education*. Belajar dari negara maju, pendidikan untuk menyiapkan masyarakat yang serba berbeda satu sama lain, perlu mempertimbangkan pembentukan anak didik agar menyadari hal tersebut. Keragaman budaya, dan kemajemukan bangsa Indonesia merupakan alasan kuat untuk hadirnya pendidikan multikultur.
- (d) Kurikulum mendatang hendaknya memberikan peluang yang besar adanya hak untuk hidup berdemokrasi, bertanggung jawab, kebebasan berpendapat, mengajarkan dan memberi peluang untuk toleransi, memiliki kebebasan dalam beragama, taat pada hukum, dan menghormati HAM (Hak Asasi Manusia).
- (e) Kurikulum mendatang hendaknya sejalan dengan semangat reformasi yang menumbuh-kembangkan budaya efisien dan efektif, atau bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebagai perwujudan semangat reformasi

Implikasi kedua, melalui pemisahan kurikulum 93 dengan kurikulum sebelumnya, dapat diidentifikasi adanya tanda awal pergeseran kurikulum ke arah dominasi yang lebih esensial. Oleh karena itu ke depan masih perlu dikaji lagi dampak yang ditimbulkan, seandainya tanda-tanda pergeseran ke arah esensial makin menguat

Melalui pendekatan esensial pendidikan mampu mengantarkan anak didik sehingga tumbuh intelektualnya dan menjadi individu yang memiliki kompetensi tertentu (Ornstein, 1995: 13). Meminjam pernyataan Ornstein, bahwa peran guru "*is an authority in his or her field.*" Kelemahan yang mungkin timbul adalah prakondisi guru yang cenderung untuk menerapkan pendekatan untuk menunjukkan kekuasaannya. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa agak sulit menemukan pengelolaan kelas yang memberi kemudahan tumbuh kembang suasana demokratis.

Para guru di lapangan mengeluh kurangnya waktu, karena materi ajar yang terkandung dalam kurikulum

sedemikian padat. Di sisi lain para guru harus lebih berperan dalam kegiatan ekstra yang melelahkan di lingkungan sekolah maupun masyarakatnya. Bilamana prakondisi demikian dibarengi dengan tuntutan kurikulum yang padat maka proses demokratisasi dalam proses belajar mengajar agak tersisihkan.

Dengan mempertajam perbedaan antar aliran timbul pertanyaan bagaimana pendekatan yang lebih arkan anak bangsa akan? Apakah dengan pendekatan yang lebih esensial? Atau dengan kata lain dapatkah sebagai agen sosial maka gagasan ideal bahwa pendidikan nasional mempunyai peran strategis sebagai *social reconstructivism* (Nurhadi, 1999: 2) akan makin sulit terwujud. Untungnya

kehidupan ini, semua dalam rentang yang satu lebih dominan dari yang lain.

Simpulan

Melalui kajian kurikulum 68, 75, 86, dan 93 menunjukkan bahwa kurikulum sangat rentan terhadap keinginan penguasa, kondisi masyarakat, dan perkembangan ilmu manajemen. Bukti-bukti yang menuntun pada kesimpulan tersebut, di antaranya pembentukan manusia Pancasila, pemberlakuan 2 model kurikulum, pergeseran paket kejuruan, penerapan analisis lingkungan, pemberlakuan sistem instruksional sebagai satu sistem, maupun kurikulum yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi

Pada penyusunan kurikulum mendatang hendaknya mempertimbangkan isu yang populer saat ini, seperti demokrasi, kebebasan berpendapat, pembudayaan hidup bertoleransi, hukum sebagai panglima, maupun semangat reformasi menuju masyarakat madani. Sejarah kurikulum menunjukkan bahwa kerentanan kurikulum dapat dijadikan strategi untuk mewujudkan keinginan masyarakat

Simpulan lain, walaupun masih merupakan tenaga prematur, sejalan dengan pemberlakuan kurikulum 93 terdapat indikasi pergeseran konsep kurikulum ke arah yang lebih esensial. Seandainya pada kurikulum mendatang terdapat penguatan indikasi tersebut, hendaknya para pengembang kurikulum mengkaji kelemahan dan kelebihanannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (1968). *Diktat: Kurikulum Sekolah Dasar 1968*. IPDA Dinas P D & K Daerah Istimewa Djogjakarta.
- Anonim. (1975). *Kurikulum Sekolah Dasar 1975. Buku I Ketentuan-ketentuan Pokok*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Anonim. (1976). *Kurikulum Sekolah Dasar 1975. Buku II G Bidang Studi Matematika*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Anonim. (1986). *Kurikulum Sekolah Dasar*. Jakarta: Dirdikdas, Dirjendikdas.
- Anonim. (1993). *Kurikulum Pendidikan Dasar 1993: Landasan, Program, dan Pengembangan*. Jakarta: Depdikbud.
- Cornesky, R.A. (1993). *The Quality Professor: Implementing TQM in the Classroom*. Madison, WI: Magna.
- De Rochee, E.F. (1998). *Educating Heart and Minds*. Thousand Oaks, CA: Corwin.
- Gordon, J. R. (1987). *A Diagnostic Approach to Organizational Behavior*. 2nd ed. Newton, MA: Allyn Bacon.
- Oliva, P. F. (1988). *Developing the Curriculum*. 2nd edition. Glenview, IL: Scott, Foresman and Company.
- Ornstein, A. C., and Linda S. Behar. (1995). *Contemporary Issues in Curriculum*. Nedham Heights, MA: Allyn and Bacon.
- Wiles, J. and Joseph Bondi. (1993). *Curriculum Development: A Guide to Practice*. 4th ed. New York: Macmillan.